

Judul : Ada ketidakpastian dalam sistem pendidikan nasional, daya tarik sekolah negeri jangan sampai hilang
Tanggal : Sabtu, 07 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Ada Ketidakpastian Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Daya Tarik Sekolah Negeri Jangan Sampai Hilang

Saat ini muncul fenomena hilangnya kebanggaan terhadap sekolah negeri dan orang tua lebih memilih sekolah swasta. Ini terjadi lantaran ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena ketidakpastian sistem zonasi, tiadanya tolok ukur kualitas standar nasional, serta layanan inklusi yang belum memadai.

Fikri Faqih menambahkan, fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan bentuk frustrasi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pelat merah yang dulunya menjadi primadona karena prestasi dan gengsi. Dia menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2021-2024, terjadi penurunan jumlah siswa di sekolah negeri jenjang dasar dan menengah, yang berbanding terbalik dengan kenaikan signifikan di sekolah

swasta. "Dahulu ada Ujian Nasional yang memperlihatkan peta kualitas sekolah, mana yang bagus dan mana yang kurang, sekolah negeri rata-rata mendominasi nilai tersebut sehingga menjadi kebanggaan," ujar Fikri Faqih dalam keterangan yang diterima *Rakyat Merdeka*, Selasa (3/2/2026). Namun, lanjut dia, sekarang ini ukuran keberhasilan seorang anak menjadi berkualitas atau tidak, menjadi kurang jelas. "Karena saat ini tidak ada

parameter spesifik atau pembandingan secara nasional," lanjut Fikri. Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim berbeda pandangan. Menurut dia, persoalan utama terletak pada tidak meratanya sebaran sekolah serta pengabaian terhadap peta jalan pendidikan yang sebenarnya sudah ada. Dia pun menjelaskan, Pemerintah sudah memiliki Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 yang

diluncurkan akhir 2024, namun dokumen tersebut sering kali tidak dijadikan acuan dalam merancang program. "Namun, sampai hari ini, peta jalan tersebut tidak ditengok dan tidak dijadikan acuan oleh Pemerintah," ungkap Satriwan kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (4/2/2026). Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih dan Satriwan Sali terkait bergesernya minat orang di sekolah negeri, berikut wawancaranya.

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS

SATRIWAN SALIM, Koordinator Nasional P2G

Tak Ada Parameter Kualitas Sekolah



Bagaimana Anda melihat fenomena penurunan jumlah siswa di sekolah negeri belakangan ini?
Kondisi ini terjadi karena orang tua kini mencari kepastian kualitas yang hilang sejak penghapusan Ujian Nasional (UN) dan kalaupun implementasi penerimaan siswa baru. Ini bukan sekadar tren, tapi sinyal peringatan keras bagi Pemerintah.

Apa faktor utama yang membuat sekolah negeri kehilangan daya tariknya?

Dahulu sekolah negeri mendominasi nilai prestasi nasional sehingga menjadi kebanggaan. Namun sekarang, ukuran keberhasilan anak menjadi kurang jelas karena tidak ada parameter spesifik atau pembandingan secara nasional.

Apa ada faktor lainnya?
Selain itu, memang ada juga faktor beban biaya dan sistem zonasi yang kaku menjadi sumber kekecewaan. Ironisnya, meski ada dana BOS, pun-

gutan biaya sering kali hampir setara dengan sekolah swasta. **Terkait zonasi, apa masalah mendasar yang paling dirasakan orang tua?**
Batasan administratif zonasi kerap menghalangi siswa mengakses sekolah terdekat dari rumah mereka hanya karena perbedaan wilayah. Hal ini meyaksa orang tua beralih ke swasta demi kenyamanan dan kepastian layanan.

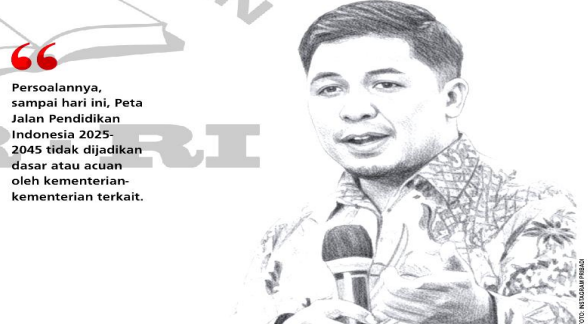
Anda juga menyortir masalah sekolah inklusi, bagaimana fakta di lapangan?
Istilah sekolah inklusi sering kali hanya menjadi simbol. Sekolah mengaku inklusi, tetapi bangunan tidak ramah disabilitas, tidak ada bidang miring atau *guiding block* tuna netra. Sumber daya manusia (SDM) atau gurunya pun tidak paham cara berperilaku penyandang disabilitas, sehingga memicu perundungan. Akibatnya, orang tua terpaksa memilih swasta atau pesantren agar anak mereka mendapatkan hak pendidikan yang layak.

“Ketiadaan peta jalan yang baku membuat kurikulum terus berubah dengan istilah ‘Ganti Menteri Ganti Kurikulum’, yang membingungkan pendidik dan siswa.”

Lantas, menurut Anda, apa langkah yang harus diambil untuk membenahi sistem ini?
Pemerintah harus segera menyusun Rencana Induk Pendidikan Nasional. Ketiadaan peta jalan yang baku membuat kurikulum terus berubah dengan istilah “Ganti Menteri Ganti Kurikulum”, yang membingungkan pendidik dan siswa. Sektor pendidikan seharusnya memiliki rencana induk jangka panjang, mengingat anggarannya mencapai 20 persen APBN atau setara Rp700 triliun.

Apakah DPR sudah mulai mengupayakan adanya peta jalan pendidikan ini?
DPR kini tengah berupaya menyusun amanat penyusunan cetak biru pendidikan ini ke dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Langkah ini diharapkan dapat meluruskan alokasi anggaran agar fokus pada kegiatan belajar mengajar, mengurangi kepadatan kelas, serta mengembalikan kualitas sekolah negeri agar benar-benar gratis dan membanggakan. ■ **NNM**

Tidak Meratanya Sebaran Sekolah



“Persoalannya, sampai hari ini, Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 tidak dijadikan dasar atau acuan oleh kementerian-kementerian terkait.”

Apakah benar saat ini orang tua siswa lebih memilih sekolah swasta dibandingkan negeri?
Persoalannya dari dulu masih sama, yaitu terkait dengan tidak meratanya sebaran sekolah di Indonesia, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Tapi, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa sekolah swasta kini jauh lebih diminati daripada negeri?

Datunya tidak valid jika dipukul rata. Tidak selalu sekolah negeri lebih diminati ketimbang swasta, atau sebaliknya. Ini sangat per kasus dan per wilayah. Di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, SMA negeri tetap sangat diminati, bahkan tidak mampu menampung tingginya minat orang tua karena keterbatasan bangku dan rombongan belajar (rombel).

Menurut Anda, apa faktor yang membuat orang tua akhirnya menjatuhkan pilihan pada sekolah swasta?
Orang tua yang memilih swasta biasanya mencari kurikulum yang lebih

berdiferensiasi, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, fasilitas lengkap, sarana modern, serta layanan guru yang prima. Faktor prestasi, minimnya kelas *bullying*, dan guru-guru unggul menjadi alasan orang tua rela mengeluarkan uang lebih meskipun biaya yang mahal.

Bagaimana dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak tertampung di negeri?

Mereka biasanya terpaksa masuk ke sekolah swasta menengah ke bawah. Di DKI Jakarta, ada solusi berupa skema “PPDB Bersama”, di mana anak didistribusikan ke sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemda. Ini adalah solusi yang bisa dipadukan contoh.

Ada fenomena unik di beberapa daerah di mana SD negeri justru kekurangan murid, kenapa hal itu terjadi?

Ini karena faktor geografis dan demografis. Di Kabupaten Semarang, puluhan SD negeri tidak ada pendaftar karena orang tua menyekolahkan anaknya ke swasta. Sementara di Pasuruan, jumlah SD negeri lebih banyak dibanding calon

murid. Jadi, dinamisasi pilihan sekolah sangat bergantung pada wilayah serta konteks demografis daerah tersebut.

Lantas, bagaimana seharusnya Pemerintah menyikapi keberadaan sekolah swasta?

Jumlah sekolah negeri yang terbatas menjadikan keberadaan sekolah swasta sangat penting untuk menampung anak-anak. Tidak sepenuhnya benar bahwa orang tua lebih memilih swasta daripada negeri secara umum, ini sangat bergantung pada ketersediaan layanan dan kebutuhan spesifik orang tua di wilayah masing-masing.

Oh ya, mengenai peta jalan pendidikan, sebenarnya seperti apa sih?

Pemerintah sebenarnya sudah memilikinya. Peta jalan tersebut dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama pada akhir tahun 2024, dan sudah diluncurkan. ■ **NNM**